



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagai Dasar Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 31);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. Pendapatan Daerah Semula
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.142.994.303,00,-
 2. Dana Perimbangan Rp. 621.219.752.885,00,-
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 255.925.939.325,00,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 938.288.686.513,00,-
 - b. Pendapatan Daerah setelah perubahan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 45.828.528.866,00,-
 2. Dana Perimbangan Rp. 549.362.996.295,00,-
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 234.415.032.092,00,-
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 829.606.557.253,00,-
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Daerah semula:
 1. Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 288.281.281.441,00,-
 - b. Belanja Bunga Rp. 0,00,-
 - c. Belanja Subsidi Rp. 1.329.234.810,00,-
 - d. Belanja Hibah Rp. 1.915.000,000,00,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 750.000,000,00,-
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kampung Rp. 4.082.333.976,00,-
 - g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 157.981.752.089,00,-
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.513.966.839,00,-
 - Jumlah Rp. 457.853.569.155,00,-
 2. Belanja Langsung
 - a. Belanja Pegawai Rp. 65.554.456.371,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 217.086.030.844,00,-
 - c. Belanja Modal Rp. 198.853.097.323,00,-
 - Jumlah Rp. 481.493.584.538,00,-
 - Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2) Rp. 939.347.153.693,00,-

b. Belanja Daerah setelah perubahan:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 279.836.388.380,00,-
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 1.329.234.810,00,-
d. Belanja Hibah	Rp. 7.508.700.000,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.250.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 2.777.865.578,00,-
g. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 151.273.435.330,00,-
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.412.685.839,00,-
Jumlah	Rp. 455.388.309.937,00,-

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp. 62.358.039.121,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.643.240.556,00,-
c. Belanja Modal	Rp. 172.773.383.424,00,-
Jumlah	Rp. 389.774.663.101,00,-

Jumlah Belanja Daerah Semula (1+2)

Rp. 845.162.973.038,00,-

3. Pembiayaan Daerah sebelum perubahan:

a. Penerimaan Daerah	Rp. 3.000.000.000,00,-
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 1.941.532.820,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 1.058.467.180,00,-

4. Pembiayann Daerah setelah perubahan:

a. Penerimaan Daerah	Rp. 15.906.415.785,00,-
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 350.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 15.556.415.785,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 0,00,-

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 JUNI 2020 M

25 SYAWAL 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 17 JUNI 2020 M

25 SYAWAL 1441 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 536

